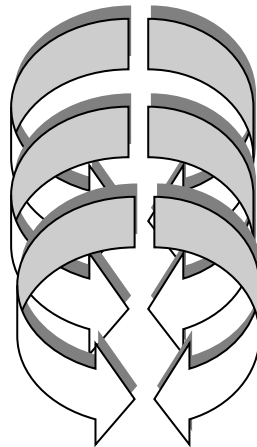




**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN TEMBALANG
TAHUN 2017**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengharuskan setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 telah mengamanatkan pada Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah secara efektif, sistematis dan terarah yang dimulai dari rencana 5 (lima) tahun atau Renstra kemudian berjenjang ke rencana 1 (satu) tahun atau Renja. Renstra tahun 2016-2021 merupakan penjabaran periode ke- III dari RPJPD.

Renstra Kecamatan Tembalang tahun 2016-2021 ini disusun mengacu pada Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan selama periode masa jabatan. Renstra Kecamatan Tembalang disusun secara transparan dan partisipatif yaitu menampung seluruh masukan pejabat terkait, karyawan Kecamatan dan Kelurahan, Muspika serta tokoh-tokoh masyarakat, dimaksudkan untuk bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap, menyeluruh dan dapat menyesuaikan kondisi lingkungan untuk dapat dilakukan perubahan/perbaikan sesuai dengan tuntutan kondisi strategis di Wilayah. Dengan demikian

Renstra Kecamatan Tembalang merupakan pedoman bagi alur pembangunan wilayah dengan seluruh Muspika di wilayah Kecamatan Tembalang.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Tembalang Tahun 2016-2021 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 61) ;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98).
 22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 107) ;
 23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang;
 25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan yang bersifat teknis strategis jangka menengah 5 tahun dengan maksud adalah untuk menyediakan pedoman / acuan penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan tahunan di lingkungan Kecamatan, sehingga tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Sebagai alat untuk menterjemahkan dan menyelaraskan antara visi, misi dan janji politik Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan, sasaran dan program prioritas dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ;
2. Sebagai pedoman pada masing-masing Seksi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Tembalang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan setiap tahunnya sehingga menjadi terintegrasi, terpadu, terarah dan terukur serta berorientasi pada pencapaian hasil serta dampak yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Semarang ;
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan serta Rencana Program Kerja Tahunan (RPTK) Kelurahan di lingkungan Kecamatan Tembalang Kota Semarang ;
4. Sebagai dasar pengukuran kinerja tahunan dan lima tahunan terhadap Kecamatan selaku Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang serta pada masing-masing Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Tembalang terkait indikator kinerja eselon ;
5. Sebagai acuan bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kewilayahan di lingkungan Kecamatan Tembalang serta pengawasan atas kinerja Pemerintah Kecamatan Tembalang Kota Semarang .

1.4 Sistematika Penulisan

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Tembalang Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Periode 2016-2021 mengacu visi misi Walikota-Wakil Walikota Semarang terpilih;
2. Dokumen Renstra harus sinkron dan sinergis dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam fungsi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Rencana strategis menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya hingga tahun 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Tembalang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur organisasi
 - 2.1.1 Tugas Kecamatan
 - 2.1.2 Fungsi Kecamatan
 - 2.1.3 Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tembalang
 - 2.2.1 Sumber daya manusia
 - 2.2.2 Sumber daya alam (kewilayahan)

	2.2.3 Sarana dan prasarana
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembalang
	2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
	3.3 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
	3.4 Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.1Tugas Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 sebagai Unsur Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik, Kecamatan Tembalang mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- b. Kecamatan merupakan pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- c. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- d. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Camat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- c. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- e. penyelenggaraan kerjasama;
- f. penyelenggaraan sekretariat;
- g. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Walikota yang didelegasikan kepada Camat;
- k. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- m. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

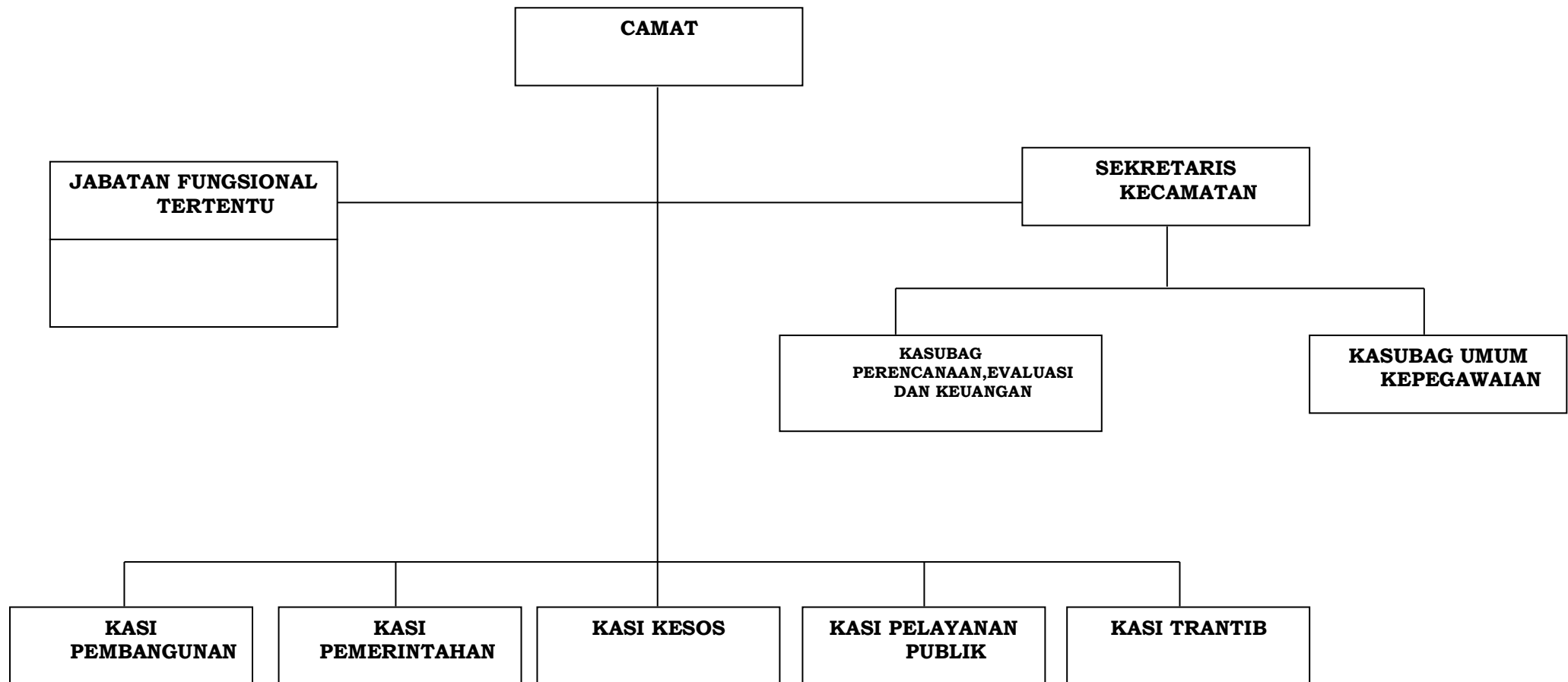
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan

Struktur Organisasi Kecamatan Tembalang terdiri atas beberapa jabatan

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas;
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Publik
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- h. Jabatan Fungsional.

Dengan struktur organisasi Kecamatan Tembalang sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
BAGAN ORGANISASI KECAMATAN



2.2 Sumber Daya Kecamatan Tembalang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan / karyawan di lingkungan Kecamatan Tembalang Per Oktober tahun 2017 sebanyak 96 ASN dan 31 non ASN orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

TABEL 2.1
DATA PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
PER OKTOBER 2017

No	KELURAHAN	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JUMLAH
1	Kecamatan	1	1	5	2	9
2	Bulusan	-	-	1	4	5
3	Kramas	-	-	1	4	5
4	Tembalang	-	-	1	4	5
5	Jangli	-	-	1	4	5
6	Meteseh	-	-	1	3	4
7	Rowosari	-	-	1	4	5
8	Mangunharjo	-	-	1	4	5
9	Sambiroto	-	-	1	4	5
10	Tandang	-	-	1	4	5
11	Sendangguwo	-	-	1	3	4
12	Kedungmundu	-	-	1	3	4
13	Sendangmulyo	-	-	1	4	5
	JUMLAH	1	1	17	47	96

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

Menurut golongan pegawai Kecamatan Tembalang terdiri dari :

TABEL 2.2
DATA PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
PER OKTOBER 2017

No	KELURAHAN	IV	III	II	I	JUMLAH
1	Kecamatan	3	13	8	1	25
2	Bulusan	-	5	-	-	5
3	Kramas	-	5	-	-	5
4	Tembalang	-	6	1	-	7
5	Jangli	-	5	1	-	6
6	Meteseh	-	5	-	-	5
7	Rowosari	-	5	-	1	6
8	Mangunharjo	-	6	-	-	6
9	Sambiroto	-	6	1	-	7
10	Tandang	-	7	-	-	7
11	Sendangguwo	-	4	1	-	5
12	Kedungmundu	-	6	-	-	6
13	Sendangmulyo	-	6	-	-	6
	JUMLAH	3	79	12	2	96

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

Berdasar tingkat pendidikan yang ada sebagai berikut :

TABEL 2.3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER OKTOBER 2017

No	KELURAHAN	S2	S1	D2	D3	SLTA	SLTP	JUMLAH
1	Kecamatan	1	9	2	2	10	1	25
2	Bulusan	-	2	-	-	3	-	5
3	Kramas	-	4	-	-	1	-	5
4	Tembalang	1	4	-	1	1	-	7
5	Jangli	-	4	-	-	2	-	6
6	Meteseh	-	4	-	-	1	-	5
7	Rowosari	-	3	-	-	3	-	6
8	Mangunharjo	-	4	-	-	2	-	6
9	Sambiroto	-	3	-	1	3	-	7
10	Tandang	-	2	-	1	4	-	7
11	Sendangguwo	-	2	-	-	3	-	5
12	Kedungmundu	-	5	-	-	1	-	6
13	Sendangmulyo	-	2	1	-	3	-	6
	JUMLAH	2	48	3	5	37	1	96

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

Sedangkan menurut jenis kelamin sebagai berikut :

TABEL 2.4
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER OKTOBER 2017

No	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kecamatan	17	8	25
2	Bulusan	5	-	5
3	Kramas	3	2	5
4	Tembalang	5	2	7
5	Jangli	3	3	6
6	Meteseh	4	1	5
7	Rowosari	3	3	6
8	Mangunharjo	4	2	6
9	Sambiroto	5	2	7
10	Tandang	4	3	7
11	Sendangguwo	4	1	5
12	Kedungmundu	4	2	6
13	Sendangmulyo	3	3	6
	JUMLAH	64	32	96

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

TABEL 2.5
JUMLAH PERANGKAT KELURAHAN YANG MEMENUHI JABATAN
PER OKTOBER 2017

KELURAHAN	LURAH	SEKLUR	KASI PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN	KASI KESSOS	KASI TRANTIB
Bulusan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Kramas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tembalang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jangli	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Meteseh	Ada	Ada	Ada	-	Ada
Rowosari	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Mangunharjo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sambiroto	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tandang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Sendangguwo	Ada	Ada	Ada	-	Ada
Kedungmundu	Ada	Ada	Ada	Ada	-
Sendangmulyo	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

TABEL 2.6
DATA PEGAWAI NON ASN
KECAMATAN TEMBALANG
PER OKTOBER 2017

NO	KELURAHAN	KEBERSIHAN KANTOR	KEBERSIHAN RODA 3	KEAMANAN	SOPIR SAMPAH
1	Kecamatan	-	10	6	2
2	Bulusan	1	-	-	-
3	Kramas	1	-	-	-
4	Tembalang	1	-	-	-
5	Jangli	1	-	-	-
6	Meteseh	1	-	-	-
7	Rowosari	1	-	-	-
8	Mangunharjo	1	-	-	-
9	Sambiroto	1	-	-	-
10	Tandang	1	-	-	-
11	Sendangguwo	1	-	-	-
12	Kedungmundu	1	-	-	-
13	Sendangmulyo	1	-	-	-
	JUMLAH	12	10	6	2

Sumber : kasubag umum dan kepegawaian

2.2.2 Sumber Daya Alam (Kewilayahan)

2.2.2.1.Kondisi, dan Potensi Geografis



Tembalang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 3.924,60 ha dengan batasan wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Candisari, dan Kecamatan Pedurungan
- Sebelah Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik
- Sebelah Barat : Kecamatan Banyumanik

TABEL 2.7

JUMLAH KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TEMBALANG

No.	Kelurahan	Jumlah		Luas (Ha)
		RW	RT	
1	2	3	4	5
1.	Meteseh	30	186	498,97
2.	Rowosari	9	44	719,58
3.	Kramas	5	23	93,34
4.	Jangli	5	40	207,00
5.	Tandang	14	125	375,74
6.	Kedungmundu	9	73	149,25
7.	Sendangmulyo	30	256	358,57
8.	Mangunharjo	10	69	303,80
9.	Bulusan	6	32	304,07
10.	Tembalang	8	35	268,23
11.	Sambiroto	11	96	318,33
12.	Sendangguwo	9	112	327,72
JUMLAH		146	1.091	3.924,60

Sumber Data Seksi Pemerintahan Kecamatan Tembalang

Secara topografis Kecamatan Tembalang terbagi atas wilayah atas, dan wilayah bawah. Luas wilayah Kecamatan Tembalang berdasarkan kemiringan meliputi :

- Datar (0° - 2°) ± 2747,27 ha
- Curam (2° - 15°) ±981,115 ha
- Curam (15° - 20°) ±176,61 ha
- Sangat Curam (> 40°) ±19,60 ha

2.2.2.2.Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Tembalang sampai dengan awal Oktober 2017 sebanyak 174.736 jiwa, dengan persebaran penduduk di masing-masing kelurahan sebagai berikut :

TABEL 2.8

JUMLAH KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN TEMBALANG

NO.	KELURAHAN	PENDUDUK WNI + WNA		JUMLAH PENDUDUK WNI + WNA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1.	Meteseh	10.235	10.041	20.276
2.	Rowosari	5.978	5.846	11.824
3.	Kramas	1.765	1.740	3.505
4.	Jangli	3.633	3.742	7.375
5.	Tandang	12.301	12.302	24.603
6.	Kedungmundu	5.804	6.002	11.806
7.	Sendanguwo	11.033	10.990	22.023
8.	Sendangmulyo	18.869	18.539	37.408
9.	Mangunharjo	4.925	4.863	9.788
10.	Bulusan	2.862	2.799	5.661
11.	Tembalang	2.793	2.767	5.560
12.	Sambiroto	7.351	7.556	14.907
JUMLAH		87.549	87.187	174.736

- *Sumber Data Seksi Kependudukan Kecamatan Tembalan*

Sebagian besar warga Kecamatan Tembalang bermata pencaharian sebagai buruh industri berikutnya buruh bangunan, buruh tani dan sebagainya dengan urutan sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.9
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
DI KECAMATAN TEMBALANG
TAHUN 2017

No	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Petani /Buruh Tani	5.407	
2	Pengusaha	2.823	
3	Buruh industri	22.409	
4	Buruh bangunan	12.915	
5	Pedagang	5.451	
6	Pengangkutan	952	
7	PNS	6.295	
8	TNI/POLRI	1.037	
9	Pensiunan	3.768	
10	Lain – lain	12.983	

Sumber :Monografi kecamatan Tembalang semester I Tahun 2017

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Tembalang didukung dengan peralatan, dan perlengkapan sebagai berikut :

TABEL 2.10
SARANA DAN PRASARANA KANTOR
KECAMATAN TEMBALANG TAHUN 2017

No.	Jenis Barang	Jumlah
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1 buah
2.	Gedung Kantor Kelurahan	12 buah
3.	Gedung Sekretariat Bersama	1 buah
4.	Balai Kelurahan	12 buah
5.	Meja Kerja	241 buah
6.	Kursi Kerja	199 buah
7.	Meja Rapat	48 buah
8.	Kursi Rapat	256 buah

9.	Kursi Besi	115 buah
10.	Kursi Tamu	26 buah
11.	Kursi lipat	315 buah
12.	Kursi Putar	20 buah
13.	Meja Piket	1 buah
14.	Meja Tamu	3 buah
15.	Meja Resepsionis	1 buah
16.	Meja komputer	9 buah
17.	Meja rapat lipat	1 buah
18.	Kursi tunggu	11 buah
19.	Almari Kayu	15 buah
20.	Almari Penyimpanan Arsip	38 buah
21.	Rak Kartu Kendali	1 buah
22.	Rak Kayu	11 buah
23.	Rak Besi	15 buah
24.	Brankas	4 buah
25.	Komputer	36 buah
26.	Laptop	18 buah
27.	Printer	21 buah
28.	Fotocopy	1 buah
29.	Mesin Ketik Elektrik	1 buah
30.	Mesin Ketik Manual	20 buah
31.	Pesawat Faximille	7 buah
32.	Pesawat Telpon	9 buah
33.	HT	1 buah
34.	Pesawat Rig	1 buah
35.	Kamera	4 buah
36.	AC	10 unit
37.	Jam dinding	17 buah
38.	Kipas angin	29 buah
39.	Genset	2 buah
40.	Sound system	4 buah

41.	Sound system radio	6 buah
42.	Tape Recorder	1 buah
43.	Amplifier	2 buah
44.	VHF Wireless	3 buah
45.	Pengeras Suara	8 buah
46.	Tiang Microphone	3 buah
47.	Megaphone	2 buah
48.	Pompa air	3 buah
49.	Tangga aluminium	2 buah
50.	Mesin Potong Rumput	22 buah
51.	Tong Sampah	2 set
52.	Gamelan	1 set
53.	Gergaji listrik	1 buah
54.	Almari Roll o Pack	2 Unit
55.	Handycam	1 buah
56.	LCD	14 buah
57.	Layar tripoid	2 buah
58.	Dispenser	15 Unit
59.	Mimbar Podium	13 buah
60.	Peta Wilayah	13 buah
61.	Papan Data	13 buah
62.	Papan Visual	6 buah
63.	Papan Nama Instansi	13 buah
64.	Papan Kegiatan	13 buah
65.	Papan Grafik	13 buah
66.	Papan Data Grafik Khusus	1 buah
67.	Papan Tulis	1 buah
68.	Tiang Bendera	14 buah
69.	Mobil Dinas	1 buah
70.	Sepeda Motor Roda 2	27 buah
71.	Sepeda Motor Roda 3	21 buah

(Sumber Data Bendahara Barang Kecamatan Tembalang)

Jumlah tersebut belum memadai bila dibandingkan dengan beban kerja yang sangat berat, hal ini tentunya perlu pemikiran dan penanganan dimasa mendatang.





2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

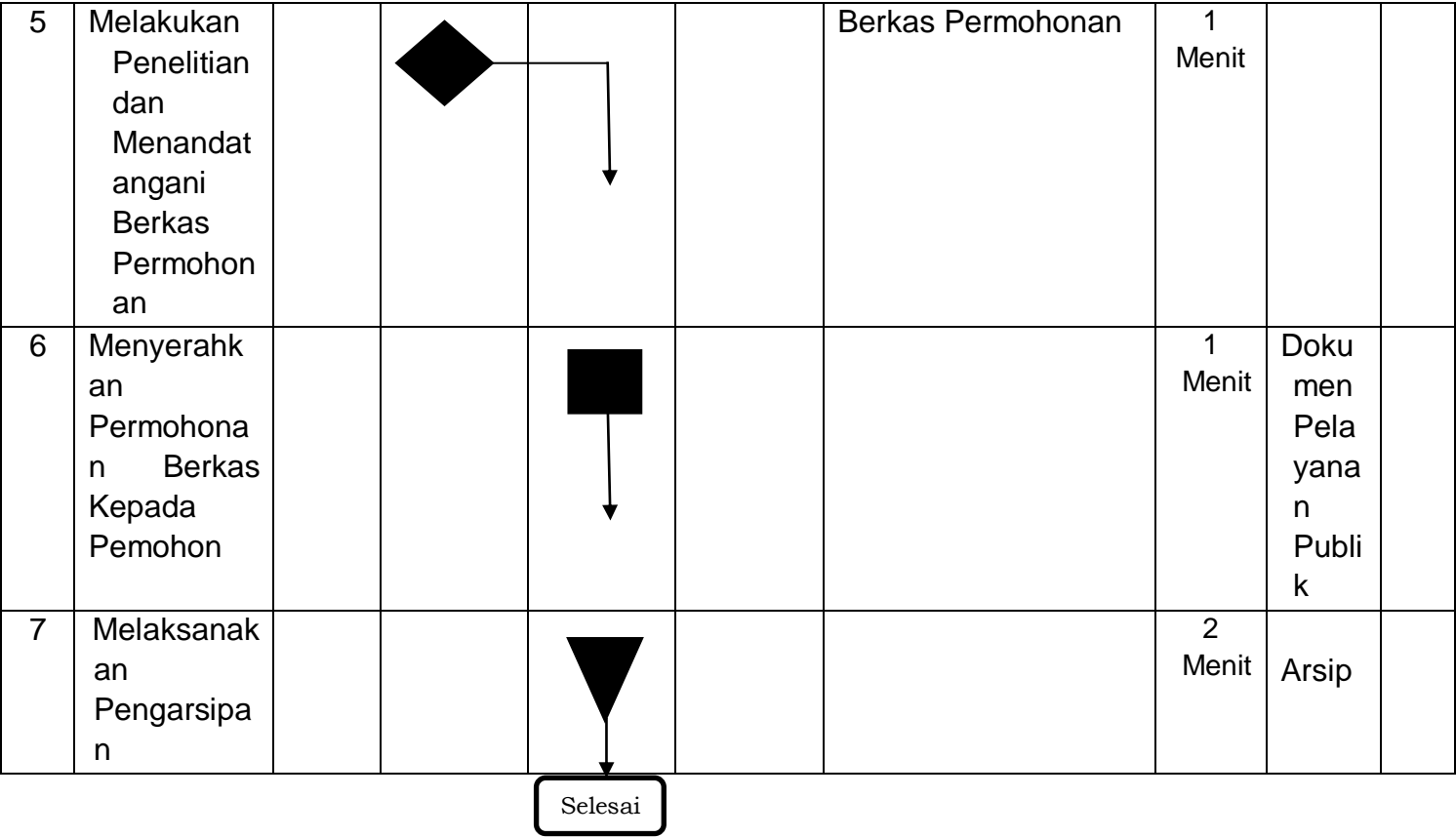
Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Tembalang mengacu pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan menurut kedudukannya didalam struktur organisasi yang ada.

Dalam pelaksanaan kinerja, aparatur selalu memperhatikan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi. Adapun standar pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

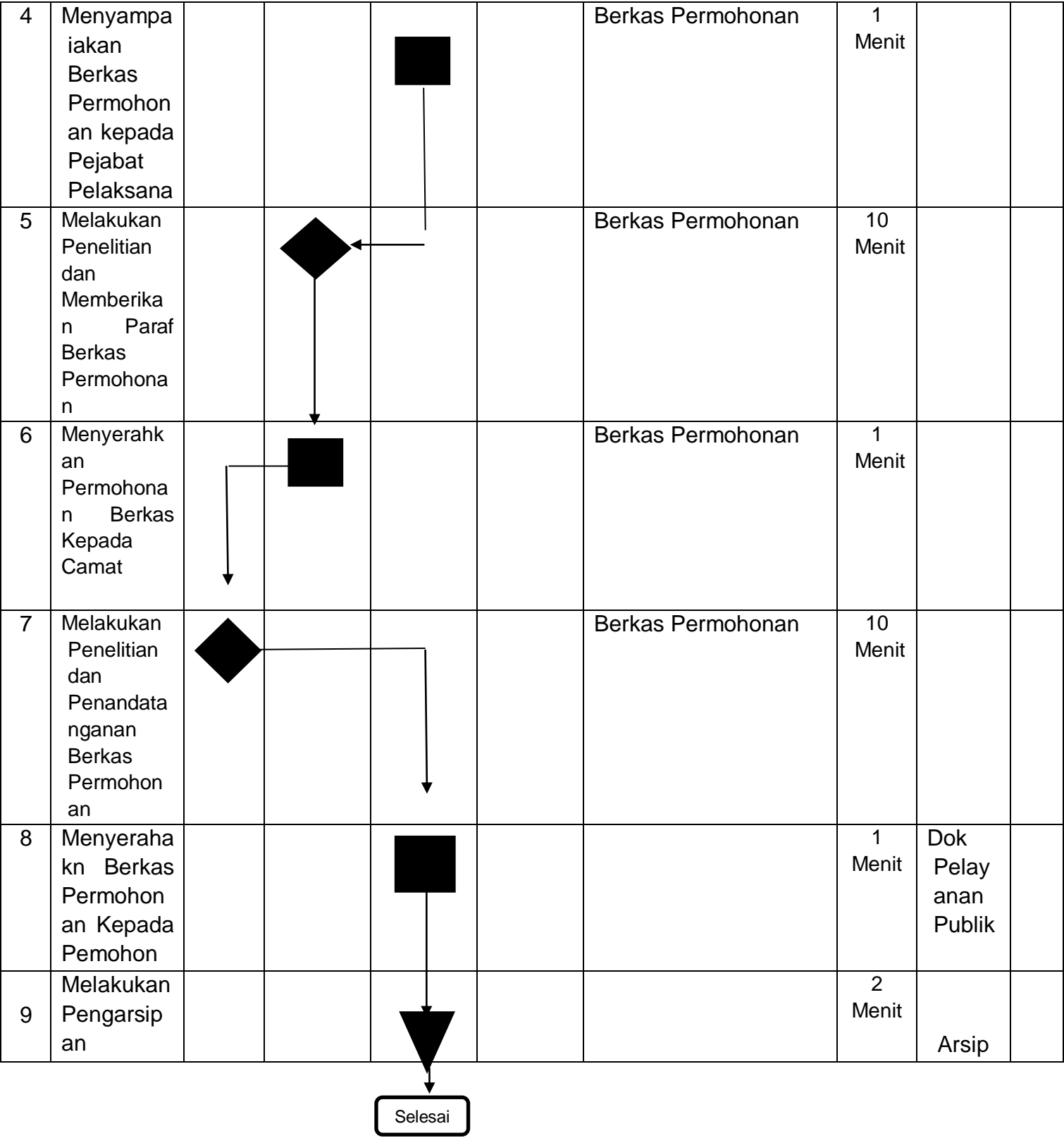
Tabel 2.11
Prosedur Pelayanan Publik One Stop Service
(Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta Perijinan)
Di Kecamatan Tembalang

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			
		Camat	Sekcam / Pejabat Struk. Es. IV	Customer Service	Pemohon	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyerahkan Berkas Pelayanan Publik di Loker Pelayanan						Setiap Saat		
2	Menerima dan Memferifikasi Berkas Permohonan dan Mengembalikan Berkas Permohonan yang tidak lengkap				Tidak	A. Kependudukan dan Pencatatan Sipil. <ul style="list-style-type: none">Fc KTP dan KK PemohonBlangko Permohonan yang sudah dilegalisasi Lurah B. Legalisasi Perijinan: <ul style="list-style-type: none">Fc KTP PemohonFc Bukti Kepemilikan Tanah / BangunanFc Akte Pendirian Perusahaan (apabila berbadan hukum)Blangko Permohonan yang sudah di legalisasi Lurah (IMB/HO)	2 Menit 5 Menit		
3	Mencatat Berkas Permohonan dalam Buku Register						1 Menit		
4	Menyampaikan Berkas Permohonan kepada Pejabat Pelaksana					Berkas Permohonan	1 Menit		



Tabel 2.12
Prosedur : Pelayanan Public One Stop Service (Pertanahan Dan Surat Keterangan Waris) Di Kecamatan Tembalang

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			
		Camat	Sekcam / Pejabat Struk. Es. IV	Custome r Service	Pemohon	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyerahkan Berkas Pelayanan Publik di Loker Pelayanan						Setiap Saat		
2	Menerima dan Memferifikasi Berkas Permohonan dan Mengembalikan Berkas Permohonan yang tidak lengkap				<p>Tidak</p>	<p>A. Pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Fc KTP Pemohon Fc KTP Pembeli (Apabila Mutasi Tanah/Bangunan) Fc Bukti Kepemilikan Tanah / Bangunan Fc SPPT dan STTS PBB Tahun Berjalan Surat Pernyataan Diri Bermaterai Rp. 6000 <p>B. Surat Keterangan Waris</p> <ul style="list-style-type: none"> Fc KTP dan KK Ahli Waris Fc Akte Kelahiran Ahli Waris Fc Surat Nikah Orangtua Fc Surat Kematian Orang Tua Surat Pernyataan Waris Bermaterai Rp. 6000,00 Fc KTP Saksi Form Surat Keterangan Waris yang sudah ditandatangani Ahli Waris, Saksi dan Lurah 	<p>5 Menit</p> <p>10 Menit</p>		
3	Mencatat Berkas Pemohonan dalam Buku Register					Berkas Permohonan	1 Menit		



Tabel 2.13
Data Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang
Tahun 2016

NO	KELURAHAN	JML		JUMLAH RT					KET
		RT	RW	YANG HADIR	%	JUMLAH USULAN	YANG DIAKOMODIR	%	
1	BULUSAN	31	6	32	87	22	12	55	
2	KRAMAS	23	5	24	86	72	12	17	
3	TEMBALANG	35	8	39	91	89	17	19	
4	METESEH	185	30	50	23	81	23	28	
5	MANGUNHARJO	65	10	55	73	65	16	25	
6	SAMBIROTO	94	11	54	51	37	14	38	
7	KEDUNGmundu	72	9	49	61	32	18	56	
8	TANDANG	126	14	51	36	99	14	14	
9	SENDANGGUWO	110	9	49	41	57	15	26	
10	SENDANGMulyo	256	30	58	20	128	17	13	
11	JANGLI	40	5	41	91	37	14	38	
12	ROWOSARI	43	9	40	77	67	19	28	
	JUMLAH	1.080	146	542	61	786	191	30	

Sumber: Data Musrenbang Kecamatan

Berikut kami sampaikan gambaran pelayanan kinerja di Kecamatan Tembalang selama tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja	Target IKK	TARGET Indikator Lainnya	Target Renstra Pd Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah TPS yang berada di wilayah Kecamatan		24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	24 TPS	100	100	100	100	100
2	Daya tampung TPS		16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	16.000 m ³	100	100	100	100	100
3	Volume sampah yang terangkut (rekapitulasi data ritasi)		44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	44.640 m ³	100	100	100	100	100
4	Rata-rata frekuensi pengangkutan sampah oleh truk sampah		7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	7 kali per minggu	100	100	100	100	100
5	Jumlah kendaraan pengangkut sampah yang dikelola oleh Kecamatan 🚲 Sepeda motor roda 3 🚛 Truk sampah		18	4	5	5	18	18	4	5	5	18	18	100	100	100	100	100
			6	3	3	5	5	6	3	3	5	5	6	100	100	100	100	100
6	Jumlah titik pantau Adipura yang tertangani		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

7	Jumlah pengaduan masyarakat kepada kecamatan atas pelayanan publik		0 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	4 pengaduan	4 pengaduan	4 pengaduan	2 pengaduan	1 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	4 pengaduan	100	100	100	100	100
8	Jumlah pengaduan yang dapat ditangani dan diselesaikan kecamatan		0 pengaduan	3 pengaduan	3 pengaduan	4 pengaduan	4 pengaduan	4 pengaduan	2 pengaduan	1 pengaduan	2 pengaduan	3 pengaduan	4 pengaduan	100	100	100	100	100
9	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun/diperbaiki <div> <div></div> Kantor Kecamatan <div></div> Rumah Dinas Camat <div></div> Kantor Kelurahan <div></div> Rumah Dinas Lurah <div></div> Balai Kelurahan </div>																	
			1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100
			1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	100	100	100	100	0
			8	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	100	100	100	100	100
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	0	100	100
10	Jumlah Ormas dan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100	100	100	100	100
11	Jumlah keluarga miskin di wilayah kecamatan						4.449					4.449		100	100	100	100	100
11	JumlaKegiatan Penanggulangan Kemiskinan		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
12	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat		16	12	14	12	16	15	12	14	12	16	15	100	100	100	100	100

Sedangkan tabel pendanaan Indikatif dan realisasi tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Tahun 2010 – 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembangan kinerja Pengelolaan persampahan	90.684.000	117.740.000	180.119.000	202.229.750	198.492.000	86.556.000	117.010.000	176.157.000	197.660.750	196.592.000	95%	99%	98%	98%	99,04%
Program pengendalian pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup	7.000.000	7.000.000	29.955.000	26.000.000	80.000.000	7.000.000	7.000.000	29.955.000	26.000.000	79.950.000	100%	100%	100%	100%	99,94%
Program peningkatan sarana, dan prasarana Olah	100.000.000	0	0	0	0	96.622.000	0	0	0	0	97%	0%	0%	0%	0%
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
Program pelayanan administrasi perkantoran	252.011.000	334.587.800	409.233.900	361.211.400	455.320.000	227.729.450	316.299.250	394.312.650	336.433.050	425.479.000	90%	95%	96%	93%	93,45%
Program peningkatan sarana, dan prasarana aparatur	615.456.000	253.471.000	264.708.500	1.571.480.000	1.418.156.000	609.006.715	243.417.500	260.326.000	1.556.875.300	1.407.435.700	99%	96%	98%	99%	99,24%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan	22.266.000	30.130.000	39.940.000	103.186.850	151.224.000	21.970.000	30.130.000	36.520.000	103.186.850	151.224.000	99%	100%	91%	100%	100%
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	256.416.000	241.000.000	241.000.000	241.000.000	0	24.815.500	101.096.750	229.277.000	232.193.500	0%	10%	41%	95%	99,35%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	0	0	117.000.000	24.000.000	123.000.000	0	0	116.635.000	22.560.000	121.129.100	0%	0%	99,7%	94%	99,12%
Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah	60.000.000	0	0	0	0	44.819.000	0	0	0	0	75%	0%	0%	0%	0%
Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	35.400.000	41.160.000	1.067.550.000	2.290.560.000	2.622.850.000	33.600.000	41.160.000	1.061.250.000	2.279.760.000	2.622.850.000	95%	100%	99%	99,5%	100%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	295.200.000	634.150.000	2.371.625.600	5.356.583.000	7.770.507.000	294.464.000	631.795.800	2.361.814.100	5.321.727.600	7.696.848.770	99,8%	99,6%	99,6%	99%	99,05%

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran yang ada digunakan dengan baik untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Pada program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan indikator kinerja meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan wilayah, jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan, dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat), rata - rata pertumbuhan anggaran setiap tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian yang sangat besar dari Pemerintah Kota Semarang terhadap tingkat partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan wilayah, sehingga kegiatan - kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusia dapat tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pencapaian indikator kinerja OPD Kecamatan Tembalang dilihat dari pencapaian kinerja anggaran OPD selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, menunjukkan hasil yang bagus dari tahun ke tahun dengan serapan anggaran dan realisasi fisik diatas 90%. Dari pencapaian kinerja tersebut, OPD Kecamatan Tembalang memberikan kontribusi terhadap tercapainya indikator kinerja daerah.

Analisis Capaian Kinerja

Perkembangancapaian kinerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan matriks IKK tahun 2010 s/d 2015 di atas disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama 5 (lima) tahun terakhir Kecamatan Tembalang melaksanakan 2 program yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu program pengendalian dan perusakan lingkungan hidup serta program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
2. Pelaksanaan kinerja selama ini berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)*, yang disusun dalam bentuk standar pelayanan publik berdasarkan Permen PAN Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Keputusan Menteri PAN Nomor : KEP/63/M.PAN/02/2003, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Terjadi peningkatan volume pengangkutan sampah ke TPA, jumlah TPS dan kelurahan yang terlayani pengangkutan sampah dan kebersihan tiap tahunnya.
4. Selama 5 tahun terjadi beberapa bencana alam di wilayah Kecamatan Tembalang, antara lain banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang menimbulkan kerugian materi, namun tidak menimbulkan korban jiwa.
5. Berdasarkan data tabel diatas selama 5 tahun perbaikan sarana dan prasarana maupun pembangunan sarana dan prasarana kantor mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
6. Selama 5 tahun terdapat 12 aduan masyarakat yang tercatat oleh Kecamatan Tembalang dan semuanya bisa diselesaikan baik secara langsung maupun melalui Pemerintah Kota Semarang.
7. Kecamatan Tembalang dalam 5 tahun terakhir jumlah usulan pembangunan yang didapat dari usulan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang mengalami peningkatan terutama dari segi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang.

8. Jumlah usulan/ swadaya masyarakat selama 5 tahun terakhir berdasar tabel diatas selalu meningkat tiap tahunnya, hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan sosial kemasyarakatan yang kebanyakan dananya diambilkan dari swadaya masyarakat .
9. Dari data tabel diatas selama 5 tahun terkahir jumlah KK miskin terus mengalami penurunan dengan jumlah KK miskin pada tahun 2015 sebesar 4.449 KK.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.3.1.Tantangan

- Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
- Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan
- Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
- Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan
- Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan masih perlu dioptimalkan
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan masih perlu ditingkatkan
- Kondisi sarana dan prasarana lingkungan masih perlu perbaikan dan peningkatan
- Potensi lokal kewilayahan masih perlu dukungan pembinaan dan pengembangan

- Pengelolaan kebersihan wilayah masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan
- Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan
- Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

2.3.2. Peluang

- Dukungan Pemerintah Kota Semarang terhadap Pemerintah Kecamatan Tembalang dalam penyusunan dan penerapan SOP dan SP, pengadaan sarana dan prasarana publik sesuai standar, serta pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dalam pelayanan publik
- Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya sarana prasarana di Kecamatan Tembalang untuk melaksanakan operasi penegakan perda dan menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yaitu dengan memfasilitasi kegiatan yang menjadi program kerjanya.
- Adanya perhatian yang besar dari Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan infrastruktur di wilayah
- Adanya perhatian yang besar dari Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan potensi lokal kewilayahan
- Keberadaan sarana prasarana pengelolaan kebersihan tercukupi baik di Kecamatan maupun di Kelurahan

- Adanya perhatian dari Forum Kota Sehat Kota Semarang kepada Kecamatan dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat
- Adanya stimulan pemberian hadiah dari Pemerintah Kota Semarang bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas dalam prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan Organisasi Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu keadaan yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi Organisasi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi meliputi:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tembalang, dapat kita identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

TABEL 3.1
PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	2	3
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		Belum optimalnya budaya kerja aparatur
		Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan
2.	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan
		Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan
		Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai
3.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan
		Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan
4.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan
		Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan
		Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan
5.	Belum optimalnya penanganan kebersihan wilayah Kecamatan/ Kelurahan	Pengelolaan kebersihan wilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan

6.	Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan
7.	Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan
8.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

3.2 Telaahan Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kota Semarang untuk lima tahun kedepan yaitu“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memerhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun visi diatas dijabarkan lebih lanjut dalam 4 misi :

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“Bergerak Bersama Membangun Semarang”

Makna slogan Bergerak Bersama Membangun Semarang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan

kecintaan aparaturnya dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan visi dan misi, maka visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan HEBAT, yang merupakan akronim dari Healthiness (kesehatan), Education (pendidikan), Building (infrastruktur fisik), Attitude (perilaku) dan Trading (perdagangan). Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep Think Globally Act Locally, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Semarang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memerhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Semarang namun dengan orientasi hasil yang berskala global atau internasional. Pembangunan Kota Semarang diarahkan agar hasilnya dapat dikenal dan menjadi rujukan dunia internasional.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang merupakan penjabaran RTRWN dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota dalam jangka 20 tahun. RTRW Kota Semarang 2011-2031 merupakan hasil evaluasi dan revisi dari RTRW Kota Semarang Tahun 2000-2010 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 2000 sampai Tahun 2010. Karena dalam perkembangannya Kota Semarang telah Kota Semarang terus tumbuh, dan rujukan tentang kebijakan pembangunan wilayah dan kota terus berkembang, maka Kebijakan penataan ruang perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada

Wilayah Kecamatan Tembalang sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 kawasan Tembalang dalam Rencana Pembagian Wilayah Kota dalam BWK VI dengan luas kurang lebih 4.420 (Empat ribu empat ratus dua puluh) hektar dan merupakan wilayah yang direncanakan untuk pengembangan fungsi utama pendidikan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun lima tahun kedepan, Kecamatan Tembalang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif terutama dalam rangka menghadapi perubahan paradigma masyarakat di wilayah Kecamatan Tembalang.

Perencanaan arah pembangunan di wilayah Kecamatan Tembalang hendaknya memperhatikan perubahan kondisi wilayah dan masyarakat sehingga tujuan dari pembangunan tepat tujuan dan sasaran.

Memperhatikan isu-isu yang ada, permasalahan pembangunan dan tujuan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan pada *good governance*, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan;
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Hidup Bersih Sehat (LHBS).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Tembalang.

Setelah mengidentifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan tugas fungsi dalam memberikan pelayanan publik, menelaah tata ruang, penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tembalang merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang guna mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang terpilih, dengan mendukung pada misi 1 yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas; serta misi 2 yaitu mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Tembalang adalah:

**Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih,
melayani dan memberdayakan masyarakat**

4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tembalang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Tembalang dalam periode pembangunan 2016-2021 antara lain :

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN,INDIKATOR DAN TARGET
KECAMATAN TEMBALANG TAHUN 2016 - 2021

Tujuan / Sasaran		Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2016	Target Capaian					Target Akhir Periode Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan		Tingkat Partisipasi Masyarakat	angka indeks	69	70	71	72	73	75	75
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.	%	42	48	59	62	69	75	75
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks angka	78	79	81	83	85	87	87
1	Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan OPD	- Persentase capaian kinerja Kecamatan - Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public di Kecamatan		92 100	93 100	95 100	96 100	97 100	98 100	98 100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kecamatan Tembalang dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan
2. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
3. Peningkatankeberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah
4. Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan
6. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan / Kelurahan
7. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
8. Fasilitasi peningkatan Sumber Daya Aparatur, Kinerja Pelayanan serta Tertib dan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kota Semarang, Pimpinan Perangkat Daerah (PD), pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada

Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house training*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap).

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Semarang, menjalin koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Tembalang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan
- 2) Meningkatkan koordinasi inter dan lintas sektoral di bidang pemerintahan umum
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
- 4) Meningkatkan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif
- 6) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- 7) Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan
- 8) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat

- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat
- 10) Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan
- 11) Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif
- 12) Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
- 13) Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur
- 14) Meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan

Demikian penjelasan secara spesifik akan kondisi riil Kecamatan Tembalang berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tembalang Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tercantum dalam matrik di bawah ini

TABEL 5.1
MATRIK KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat	a. Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan
			b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat
		2. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan	a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat
		3. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representatif
			b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan
2. Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih dan melayani	Sasaran 2 : Meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja Pelayanan OPD	4. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan	a. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan
			b. Meningkatkan koordinasi inter dan lintas sektoral di bidang pemerintahan umum
		5. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	a. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
			b. Meningkatkan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
		6. Peningkatan pendayagunaan aset Kecamatan / Kelurahan	a. Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan
		7. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	a. Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif
		8. Fasilitasi peningkatan Sumber Daya Aparatur, Kinerja Pelayanan serta Tertib dan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	a. Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
			b. Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur
			c. Meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta melihat akar permasalahan yang ada dan juga penyebabnya, maka dapat diatasi dengan kebijakan yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan yang direncanakan OPD Kecamatan Tembalang untuk lima tahun periode Renstra ini.

Program-program yang akan dilaksanakan OPD Kecamatan Tembalang selama 5 (lima) tahun periode Renstra ini, sesuai dengan perubahan RPJMD Kota Semarang tahun 2016 – 2021, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.
9. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

12. Program Pengelolaan Aset Pemerintah.
13. Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Matrik keterkaitan penyelesaian masalah-masalah di Kecamatan Tembalang dengan program dan kegiatan yang direncanakan, tampak pada tabel berikut ini:

TABEL 6.1**MATRIK PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI KECAMATAN DENGAN PROGRAM - KEGIATAN**

No.	Permasalahan Pokok	Akar Permasalahan	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.	Belum optimalnya pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP 2. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Belum optimalnya budaya kerja aparatur 5. Jumlah, kapabilitas, kapasitas dan kompetensi aparatur perlu ditingkatkan	1. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 2. Meningkatkan koordinasi inter dan lintas sektoral di bidang pemerintahan umum 3. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yg lebih baik 4. Meningkatkan sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi dlm pelayanan public 5.	Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan 2. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur 4. Broadband Learning Centre (BLC)
2.	Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan 2. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan ketentraman 3. Kuantitas dan kualitas anggota Linmas belum memadai	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan serta perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Tramtibum 2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
3.	Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	1. Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu dioptimalkan 2. Koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan 2. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat - Kp.Tematik)

4.	Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan 2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan 3. Potensi lokal kewilayahan perlu dukungan pembinaan dan pengembangan 	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan representative	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan 2. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang 5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan 6. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingk. 7. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang
5.	Belum optimalnya penanganan kebersihan wilayah Kecamatan / Kelurahan	Pengelolaan kebersihan wilayah perlu ditingkatkan secara berkelanjutan	Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Persampahan 2. Koordinasi Penilaian Adipura
6.	Belum optimalnya program PHBS dan LHBS di wilayah Kelurahan dan Kecamatan	Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih serta sehat	Program Peningkatan Lingkungan Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Forum Kota Sehat (FKK) Kecamatan / Kelurahan
7.	Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan tertib pencatatan dan pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan / Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan	Program Pengelolaan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan
8.	Belum optimalnya penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan / Kelurahan	Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan dan Kecamatan secara intensif	Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

9.	<p>Perlunya pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kecamatan dan Kelurahan secara rutin untuk keberlangsungan operasional</p>	<p>Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran rekening listrik, telpon dan air tiap bulan untuk kantor 2. Alat tulis kantor 3. Barang cetakan dan penggandaan 4. Penggantian komponen instalasi listrik / lampu penerangan kantor 5. Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu 6. Perjalanan dinas ke luar daerah 7. Pembayaran jasa penunjang administrasi perkantoran 8. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan 9. Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Kelurahan 	<p>Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Brg Cetakan & Penggand. 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Makanan dan Minuman 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 8. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 9. Belanja operasional kelurahan 10. Operasional Kelurahan Meteseh 11. Operasional Kelurahan Rowosari 12. Operasional Kelurahan Mangunharjo 13. Operasional Kelurahan Bulusan 14. Operasional Kelurahan Kramas 15. Operasional Kelurahan Jangli 16. Operasional Kelurahan Tandang 17. Operasional Kelurahan Tembalang 18. Operasional Kelurahan Kedungmundu 19. Operasional Kelurahan Sendangguwo 20. Operasional Kelurahan Sendangmulyo 21. Operasional Kelurahan Sambiroto
----	---	--	---	---	---

10.	Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan sarana dan prasarana kerja / operasional aparatur Kecamatan dan Kelurahan	<p>Kebutuhan rutin kantor Kecamatan dan Kelurahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Camat dan Lurah 4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 6. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kerja 7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kerja 8. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor, termasuk rumah dinas dan balai Kelurahan 9. Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas (perpanjangan STNK) 	Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 4. Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas 7. Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor 9. Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas
11.	Perlunya pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<p>Kebutuhan rutin SKPD Kecamatan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan 2. Menyusun Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Menyusun RKA dan DPA 5. Menyusun LAKIP 6. Menyusun LKjIP 7. Menyusun Renstra Perangkat Daerah 8. Menyusun LKPJ Perangkat Daerah 9. Menyusun Renja Perangkat Daerah 10. Menunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu 	Meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4. Penyusunan RKA dan DPA 5. Penyusunan LAKIP 6. Penyusunan LKjIP 7. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 8. Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah 9. Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembangunan

Kegiatan Monitoring Pengendalian Aset, pada perubahan Renstra ini masuk di Program Pengelolaan Asset Pemerintah, yang sebelumnya masuk pada Program Pengelolaan Aset Daerah. Sedangkan kegiatan Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan masuk pada Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, yang sebelumnya masuk di Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tata Pemerintahan Kecamatan masuk pada Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, sebelumnya masuk di Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sudah tidak ada lagi pada Urusan Kewilayahan, sehingga kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, masuk pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Perubahan ini dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Tembalang bisa lebih fokus dalam memberikan kontribusi terhadap terlaksananya pencapaian indikator kinerja daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, penetapan indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Tembalang adalah tingkat partisipasi masyarakat. Sesuai dengan urusan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Tembalang yaitu Kewilayahan, ditetapkan juga indikator kinerja daerah sebagai berikut:

1. Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang.
2. Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang.
3. Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang, merupakan jawaban atas permasalahan yang ada di Kecamatan Tembalang. Selain itu, rencana program dan kegiatan tersebut merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan juga merupakan cara untuk mencapai terwujudnya pembangunan di Kota Semarang, sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada OPD Kecamatan Tembalang yang

melaksanakan urusan kewilayahan yang mempunyai indikator kinerja daerah seperti yang disebutkan diatas.

Berikut ini kami sajikan matrik keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatifnya dalam 2 (dua) tabel yang berbeda

TABEL 6.2
MATRIK KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA
RENSTRA KECAMATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
<p>1. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan</p> <p>Indikator : Tingkat Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator : Cakupan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan</p>	1. Peningkatan Wilayah Kecamatan yang bersih dan sehat berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan kebersihan wilayah Kecamatan dan Kelurahan secara berkelanjutan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Sasaran : Terpeliharanya kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : a. Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani b. Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	1. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Sasaran : Terselenggaranya kegiatan kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
				2. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Sasaran : Meningkatnya jumlah Kelurahan yang mengimplementasikan program LHBS dan PHBS Indikator : a. Kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS b. Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2. Koordinasi Penilaian Adipura Sasaran : Terkoordinasinya kondisi yang dipersyaratkan Adipura di wilayah Kelurahan Indikator : Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani
		2. Peningkatan ketertiban dan ketentraman lingkungan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku dan lingkungan bersih dan sehat	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat Indikator : Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di Lingkungan RT	3. Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat Sasaran : Meningkatnya lingkungan di Kelurahan yang memenuhi LHBS dan PHBS Indikator : Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria Lingkungan Hidup Bersih Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
					4. Pendampingan Penegakan Perda di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum Sasaran : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman lingkungan melalui penegakan peraturan dan pemantauan wilayah rawan trantibum Indikator : - Persentase jumlah system keamanan lingkungan (Siskamling) RT - Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan
					5. Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat Sasaran : Meningkatnya jumlah RT di Kelurahan se Kec yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Indikator : Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan

		3. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana umum wilayah Kecamatan dan Kelurahan yg baik dan representative	4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm pembangunan melalui kehadiran perwakilannya di Musrenbang Indikator : a. Persentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan yang ditangani lewat musrenbang b. Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang c. Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	6. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Sasaran : Meningkatnya pembinaan & partisipasi masyarakat melalui kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan
					7. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang Indikator : Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan & Kecamatan
					8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan, monev dan lomba berbasis pemberdayaan Indikator : Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan
					9. Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Musrenbang Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Indikator : Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan
					10. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana & Prasarana Umum Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pembangunan fisik Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan fisik melalui hasil Musrenbang yang dilakukan jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
					11. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Sasaran : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan melalui pelaksanaan hasil Musrenbang Indikator : Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang

					12. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas kehidupan Bermasyarakat Sasaran : Meningkatnya kualitas kegiatan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat pelaksanaan hasil Musrenbang Indikator : Jumlah paket kegiatan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat pelaksanaan hasil Musrenbang
					13. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Sasaran : Meningkatnya kualitas saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan melalui pelaksanaan hasil Musrenbang Indikator : Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang
					14. Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan non fisik Indikator : Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan
					15. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Sasaran : Meningkatnya jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Indikator : Jml kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)
					16. Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Sasaran : Meningkatnya jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Indikator : Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan
					Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi lokal wilayah Kecamatan dan Kelurahan

<p>2. Meningkatnya Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang Bersih dan Melayani</p> <p>Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya Manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD</p> <p>Indikator : Persentase capaian kinerja kecamatan</p> <p>Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public di Kecamatan</p>	<p>1. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan</p>	<p>Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan</p>	<p>6. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</p> <p>Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum serta pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan b. Persentase ketersediaan sarpras pelayanan masyarakat berbasis PATEN c. Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar PATEN 	<p>17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan</p> <p>Sasaran : Terselenggaranya tata pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan normatif</p> <p>Indikator : Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p>
			<p>Meningkatkan koordinasi inter dan lintas sektoral di bidang pemerintahan umum</p>	<p>7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>Sasaran : Terpeliharanya kebersihan di wilayah Kecamatan & Kelurahan</p> <p>Indikator : Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPS</p>	<p>18. Pengembangan Budaya Kerja dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur</p> <p>Sasaran : Meningkatnya etos dan budaya kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja</p>
					<p>19. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p> <p>Sasaran : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis PATEN</p> <p>Indikator : Jumlah pelayanan administratif dan ketersediaan sarana prasarana di Kantor Kecamatan dan Kelurahan</p>
					<p>20. Broadband Learning Centre (BLC)</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi</p> <p>Indikator : Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat</p>
				<p>21. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>Sasaran : Terselenggaranya kegiatan kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA</p>	
				<p>22. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan</p> <p>Sasaran : Terselenggaranya kegiatan kebersihan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan</p> <p>Indikator : Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan</p>	

		2. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Meningkatkan sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Sasaran : Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Indikator : Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN	23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Sasaran : Terselenggaranya tata pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan yang baik dan normatif Indikator : Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
					24. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sasaran : Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan yang berbasis PATEN Indikator : Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan
			Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan public yang lebih baik	9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sasaran : Meningkatkan manajemen pengelolaan asset dan perolehan pajak Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : a. Jumlah asset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan b. Persentase Capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	25. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan Sasaran : Terwujudnya pencatatan dan pengelolaan aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan yang tertib Indikator : Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
					26. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Indikator : Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan
		3. Peningkatan pendayagunaan asset Kecamatan / Kelurahan	Meningkatkan manajemen pengelolaan asset Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan	10. Program Pengelolaan Aset Daerah Sasaran : Terpeliharanya aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan Indikator : Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	27. Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan Sasaran : Terwujudnya pencatatan dan pengelolaan aset pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan yang tertib Indikator : Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan
		4. Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Mengoptimalkan potensi pembayaran PBB di Kelurahan dan Kecamatan secara insentif	11. Program Peningkatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Sasaran : Meningkatnya perolehan pajak oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Indikator : Persentase jumlah wajib pajak yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	28. Optimalisasi Pemungutan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Indikator : Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan

		5. Fasilitas peningkatan sumber daya aparatur, kinerja pelayanan serta tertib dan kualitas perencanaan dan pelaporan	Meningkatkan standar dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran Indikator : Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	29. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air, Listrik Sasaran : Tersedianya Komunikasi, sumber daya air dan penerangan kantor Indikator : Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor pada tahun berkenaan
					30. Penyediaan Alat Tulis Kantor Sasaran : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Indikator : Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan
					31. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sasaran : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan kebutuhan kantor Indikator : Jumlah barang cetak yang disediakan pada tahun berkenaan Jumlah penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan
					32. Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Sasaran : Tersedianya komponen listrik dalam menunjang penerangan kantor Indikator : Jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan
					33. Penyediaan Makanan Dan Minuman Sasaran : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat menunjang kinerja Indikator : Jumlah kegiatan rapat
					34. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Sasaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan kementerian / lembaga terkait kinerja program Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan
					35. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Sasaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah/ Lembaga / Instansi lainnya terkait kinerja program Indikator : Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan

					<p>36. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Sasaran : Tersedianya jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran Indikator : Jumlah jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran Jumlah kegiatan penunjang kinerja</p>
					<p>37. Penyediaan operasional kelurahan Sasaran : Tersedianya penyediaan operasional kelurahan Indikator: Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan</p>
					<p>38. Operasional Kelurahan Meteseh Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>39. Operasional Kelurahan Rowosari Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>40. Operasional Kelurahan Mangunharjo Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>41. Operasional Kelurahan Bulusan Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>42. Operasional Kelurahan Kramas Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>

					<p>43. Operasional Kelurahan Jangli Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>44. Operasional Kelurahan Tandang Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>45. Operasional Kelurahan Tembalang Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>46. Operasional Kelurahan Kedungmundu Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>47. Operasional Kelurahan Sendangguwo Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>48. Operasional Kelurahan Sendangmulyo Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>
					<p>49. Operasional Kelurahan Sambiroto Sasaran : Tersedianya operasional kelurahan Indikator: Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan</p>

			Meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana prasarana aparatur	<p>13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Sasaran : Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana aparatur</p> <p>Indikator : Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>50. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fasilitas kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai</p> <p>Indikator : Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan</p>
					<p>51. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai</p> <p>Indikator : Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan</p>
					<p>52. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai</p> <p>Indikator : Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan</p>
					<p>53. Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung rumah dinas guna menunjang kinerja pegawai</p> <p>Indikator : Jumlah komponen gedung rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan</p>
					<p>54. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung kantor guna menunjang pekerjaan</p> <p>Indikator : Jumlah komponen gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan</p>
					<p>55. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas Operasional</p> <p>Sasaran : Meningkatnya fungsi kendaraan dinas operasional guna menunjang kinerja pegawai</p> <p>Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan</p>
					<p>56. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor</p> <p>Sasaran : Berfungsinya perlengkapan gedung kantor guna menunjang kinerja</p> <p>Indikator : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan</p>

					<p>57. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Sasaran : Berfungsinya peralatan gedung kantor guna menunjang kinerja Indikator : Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan</p>
					<p>58. Rehabilitasi Ringan / Sedang Gedung Kantor Sasaran : Meningkatnya fungsi gedung kantor guna meningkatkan kinerja pegawai Indikator : Jumlah perbaikan ringan / sedang gedung kantor</p>
					<p>59. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Sasaran : Meningkatnya pemeliharaan dan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas operasional Indikator : Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional</p>
			Meningkatkan tertib dan kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan	<p>13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran : Meningkatnya dan dikembangkannya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p>60. Penunjang Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu. Sasaran : Meningkatnya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu Indikator : Terpenuhinya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu</p>
					<p>61. Penyusunan LKPJ Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas LKPJ Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen LKPJ Perangkat Daerah</p>
					<p>62. Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas LKPJ Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen LAKIP Perangkat Daerah</p>
					<p>63. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan</p>

					<p>64. Penyusunan LKjIP Sasaran : Meningkatnya kualitas LKjIP Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Jumlah dokumen LKjIP Perangkat Daerah</p>
					<p>65. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.. Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah</p>
					<p>66. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Sasaran : Meningkatnya kualitas Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</p>
					<p>67. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah</p>
					<p>68. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas Renstra Perangkat Daerah Indikator : Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah</p>
					<p>69. Penyusunan RKA dan DPA Sasaran : Meningkatnya kualitas RKA dan DPA Perangkat Daerah setiap tahun Indikator : Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah</p>

Sedangkan tabel Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 6. 3
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tembalang
Kota Semarang

Tujuan/ Sasaran	Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang Bersih dan melayani				Ideks Kepuasan Masyarakat	angka	78	79		81		83		85		87		87	
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD.				Persentase capaian kinerja Kecamatan	%	92	93		95		96		97		98		98	
				Cakupan pengkoordinasin penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public di Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100	
	3.06.22		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan & Kelurahan	Pelayan an	209.968	279.255	312.433.000	398.018	353.436.000	423.064	371.108.000	449.857	319.066.000	477.561	322.256.000	209.968	322.256.000

Tujuan/ Sasaran	Kode Program	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
						2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN	Kelurahan		24		45		57		77		100		100	
			Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat yang berstandar PATEN	%		8		33		58		83		100		100	
	3.06.22	001	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	kegiatan	-	4	14.150.000	4	16.135.000	4	21.400.000	4	23.800.000	4	24.000.000	4	24.000.000
	3.06.22	002	Pengembangan Budaya Kerja dan Aparatur	kegiatan	-			3	34.575.000	5	42.800.000	5	45.250.000	5	45.300.000	5	45.300.000
	3.06.22	003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan	-	10.000	98.283.000	21.000	292.726.000	22.000	286.908.000	23.000	230.016.000	24.000	232.956.000	24.000	232.956.000
	3.06.22	004	Pengembangan BLC	jenis	-	1	200.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.15		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	M3	257.741.600	1.304 039	329.965.000	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-
		3.06.15	001	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah kegiatan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	kegiatan	70.080.000	1488	95.465.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.15	002	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasad Sarana Persampahan	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas ampah, bongkar bangunan, tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan & kelurahan	kegiatan	187.661.600	29.400	234.500.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.24		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar paten	-	96.810.000	8	121.913.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.24	001	Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	84.370.000	9	84.370.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.24	002	Implementasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelayanan	12.440.000	10.000	37.543.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.19		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah asset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah bidang	247.826.500	285	18.812.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
					Persentase capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	%	0	88	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.19	002	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	bidang	6.826.500	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.19	003	Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	%	241.000.000	82	18.812.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.25		PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	Jumlah Daerah Aset yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	jumlah aset	-			3	40.172.000	3	40.574.000	3	395.080.000	3	399.030.000	3	399.030.000
		3.06.25	004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan	jumlah aset				3	40.172.000	3	40.574.000	3	395.080.000	3	399.030.000	3	399.030.000
		3.06.26		PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	%	-			91,50	26.087.000	93,06	26.348.000	94,31	26.612.000	95,69	26.878.000	95,69	26.878000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.26	003	Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan	%	0	-	0	90	26.087.000	95	26.348.000	100	26.612.000	100	26.878.000	100	26.878000
		3.1.06.11.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	488.513.695	100	4.990.535.000	100	4.945.534.000	100	4.994.989.000	100	5.044.939.000	100	5.095.389.000	100	5.095.389.000
		3.1.06.11.01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpn, air, listrik dan koran kantor	Jumlah rekening	202.030.695	55	337.800.000	55	171.000.000	5	172.000.000	5	173.000.000	5	174.000.000	5	174.000.000
		3.1.06.11.01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yg disediakan pada tahun berkenaan	jenis	79.200.000	36	87.000.000	36	24.000.000	36	25.000.000	36	26.000.000	36	27.000.000	36	27.000.000
		3.1.06.11.01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan	jenis	47.733.000	4	48.453.000	2	30.600.000	2	31.000.000	3	32.000.000	3	33.000.000	3	33.000.000
					Jumlah penggandaan yg disediakan pada tahun berkenaan	lembar	-	142.000	-	146.000	-	70.320	-	75.000	-	78.000	-	81.000	-
		3.1.06.11.01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan	jenis	10.000.000	8	10.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	21.000.000	8	21.000.000	8	21.000.000
		3.1.06.11.01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan rapat	kegiatan	134.550.000	172	156.600.000	28	94.200.000	40	95.000.000	40	96.000.000	52	97.000.00	52	97.000.00
		3.1.06.11.01	018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	kegiatan	15.000.000	182	3.999.802.000	10	50.000.000	10	55.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.1.06.11.01	028	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah ke	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan	kegiatan	0	-	0	-	3.872.074.000	189	3.911.989.000	192	3.954.939.000	195	3.985.272.000	197	3.985.272.000
		3.1.06.11.01	154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran	kegiatan	0	33	350.880.000	45	70.460.000	47	71.000.000	55	72.000.000	55	73.000.000	55	73.000.000
		3.1.06.11.01	157	Penyediaan Operasional Kelurahan	Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan	jenis	0	-	0	8	613.200.000	-	0	-	0	-	0	10	86.000.000
		3.1.06.11.01	251	Operasional Kelurahan Meteseh	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	50.379.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	252	Operasional Kelurahan Rowosari	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	253	Operasional Kelurahan Mangunharjo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	254	Operasional Kelurahan Bulusan	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	255	Operasional Kelurahan Kramas	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.1.06.11.01	256	Operasional Kelurahan Jangli	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	257	Operasional Kelurahan Tandang	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.168.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	258	Operasional Kelurahan Tembalang	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.168.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	259	Operasional Kelurahan Kedungmundu	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	.260	Operasional Kelurahan Sendangguwo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.168.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.01	261	Operasional Kelurahan Sendangmulyo	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.168.000	100	51.331.000	100	59.541.000	100	59.541.000
		3.1.06.11.01	262	Operasional Kelurahan Sambiroto	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	%	0	-	0	-	0	100	51.166.000	100	51.329.000	100	51.416.000	100	51.416.000
		3.1.06.11.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	909.119.400	100	1.029.758.000	100	1.140.039.000	100	1.151.440.000	100	1.162.954.000	100	1.174.584.000	100	1.174.584.000
		3.1.06.11.02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yg mendukung kinerja pegawai pengadaan tahun berkenaan	unit	0	1	205.000.000	-	0	-	0	12	150.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.1.06.11.02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan	jenis	0	8	90.338.000	7	169.000.000	8	170.000.000	8	171.000.000	8	165.784.000	8	165.784.000
		3.1.06.11.02	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan thn berkenaan	jenis	158.680.000	10	315.500.000	10	314.700.000	12	300.000.000	12	208.254.000	12	200.000.000	12	200.000.000
		3.1.06.11.02	021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	20.400.000	1	24.400.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
		3.1.06.11.02	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	unit	239.859.400	-	0	13	152.200.000	13	175.840.000	13	176.000.000	13	176.000.000	13	176.000.000
		3.1.06.11.02	024	Pemelihataan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kend. dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan	unit	67.780.000	29	106.800.000	30	136.639.000	30	107.000.000	42	108.000.000	43	108.000.000	43	108.000.000
		3.1.06.11.02	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	jenis	0	-	0	-	0	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
		3.1.06.11.02	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan	jenis	68.600.000	7	80.320.000	6	130.000.000	7	131.000.000	7	132.000.000	7	132.000.000	7	132.000.000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								2017		2018		2019		2020		2021			
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.1.06.11.02	042	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah perbaikan sedang/berat gedung kantor	unit	350.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	2	200.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000
		3.1.06.11	083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas operasional	unit	3.800.000	52	7.400.000	52	7.500.000	52	7.600.000	64	7.700.000	65	7.800.000	65	7.800.000
		3.1.06.11.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	165.340.000	100	171.312.000	100	181.653.000	100	183.470.000	100	185.305.000	100	187.158.000	100	187.158.000
		3.1.06.11.06	005	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Terpenuhinya target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara & Bendahara Pembantu	%	89.340.000	100	122.852.000	100	167.663.000	100	168.920.000	100	170.255.000	100	170.300.000	100	170.300.000
		3.1.06.11.06	006	Penyusunan LKPJ SKPD	Jumlah dokumen LKPJ perangkat daerah	dokumen	15.000.000	5	8.365.000	5	1.435.000	5	1.500.000	5	1.550.000	5	2.908.000	5	2.908.000
		3.1.06.11.06	010	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP Perangkat Daerah	dokumen	7.500.000	5	4.730.000	5	1.435.000	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.1.06.11.06	014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan	dokumen	7.500.000	5	6.330.000	5	4.020.000	5	4.100.000	5	4.150.000	5	4.200.000	5	4.200.000
		3.1.06.11.06	018	Penyusunan LKjIP	Jumlah LKjIP Perangkat Daerah	dokumen	0	-	0	-	0	5	1.500.000	5	1.550.000	5	1.600.000	5	1.600.000
		3.1.06.11.06	0 20	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	dokumen	7.500.000	5	5.080.000	5	1.305.000	5	1.400.000	5	1.500.000	5	1.600.000	5	1.600.000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.1.06.11.06	0 23	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	0	1	2.235.000	1	725.000	1	850.000	1	900.000	1	950.000	1	950.000
		3.1.06.11.06	0 28	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Renja Perangkat Daerah	dokumen	7.500.000	5	5.895.000	5	1.545.000	5	1.600.000	5	1.700.000	5	1.800.000	5	1.800.000
		3.1.06.11.06	029	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah	dokumen	16.000.000	5	4.750.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.1.06.11.06	034	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA Perangkat Daerah	dokumen	15.000.000	2	11.075.000	2	3.525.000	2	3.600.000	2	3.700.000	2	3.800.000	2	3.800.000
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pembangunan					Tingkat Partisipasi Masyarakat	%	69	70		71		72		73		75		75	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.				Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.	%	42	48		59		62		69		75		75	
		3.06.16		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	%	106.487.300	100	73.225.000	100	68.457.000	100	69.142.000	100	69.833.000	100	70.532.000	100	70.532.000
				-	Cakupan kegiatan kebersihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	%	0	-	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								2017		2018		2019		2020		2021			
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.16	001	Koordinasi Penilaian Adipura	Persentase jml titik pantau di Kelurahan yang tertangani	%	106.487.300	100	73.225.000	100	18.457.000	100	18.142.000	100	18.200.000	100	18.300.000	100	18.300.000
		3.06.16	003	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah kegi kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kec dan kelurahan	kegiatan	0	-	0	5.400	50.000.000	5.400	51.000.000	5.400	51.633.000	5.400	52.232.000	5.400	52.232.000
		3.06.23		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Kelurahan yg melaksanakan program LHBS dan PHBS	kelurah an	-	130	0	140	351.231.000	150	354.743.000	165	358.291.000	177	361.873.000	177	361.873.000
					Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%		88		140		150		165		177		177	
		3.06.23	001	Fasilitasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat	Persentase jumlah RW di Kelurahan Yg memenuhi kriteria LHBS dan PHBS	%	-	20	337.549.000	40	351.231.000	60	354.743.000	80	358.291.000	100	361.873.000	100	361.873.000
		3.06.18		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di lingkungan RT	%	-	79	12.000.000	82	232.988.000	85	235.318.000	88	237.671.000	90	240.048.000	90	240.048.000

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.18	006	Pendampingan Penegakan PERDA di Kecamatan dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	Persentase jumlah system keamanan lingkungan (siskampling)	%	-	58	12.000.000	67	232.988.000	70	220.318.000	72	221.671.000	75	223.048.000	75	223.048.000
					Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	%	-	1		1		4		5		6		6	
		3.06.18		Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yg melaksanakan sistem keamanan lingkungan	Jumlah RT	-	-	0	-	0	552	15.000.000	576	16.000.000	650	17.000.000	650	17.000.000
		3.06.21		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang	%	13.967.372.000	50	12.360.192.000	51	12.218.542.000	52	12.333.149.000	53	12.414.815.000	55	12.573.301.000	55	12.573.301.000
					Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang	%		90, 26		91, 44		92, 63		93, 81		95		95	
					Persentase kahadiran RT dalam musrenbang	%		97, 70		98, 30		98, 87		99,04		99,5		99,5	

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.21	001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan	kegiatan	196.860.000	12	164.162.500	15	201.000.000	17	210.000.000	17	212.000.000	17	214.000.000	17	214.000.000
		3.06.21	002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tk RW, Kelurahan & Kecamatan	dokumen	151.890.000	180	121.775.000	194	141.782.800	210	162.000.000	220	164.000.000	230	166.000.000	230	166.000.000
		3.06.21	003	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan	dokumen	208.394.000	16	104.080.000	18	142.162.200	20	145.300.000	22	146.000.000	24	147.000.000	24	147.000.000
		3.06.21	004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	paket	4.338.700.000	12	2.187.150.000	15	2.489.850.000	18	3.425.000.000	21	2.750.000.000	25	2.950.000.000	25	2.950.000.000
		3.06.21	005	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah kegiatan pembangunan fisik hasil Musrenbang yang dilakukan jasa konsultansi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan	kegiatan	596.672.000	212	495.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.21	006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan	Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kel pelaksanaan hasil Musrenbang	kegiatan	5.154.000.000	80	4.732.374.500	49	4.641.859.000	52	4.465.000.000	55	4.586.000.000	58	4.245.400.000	58	4.245.400.000
		3.06.21	007	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat	Jumlah paket kegiatan peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat pelaksanaan hasil musrenbang	kegiatan	0	1	50.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		3.06.21	008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan	Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang	kegiatan	3.320.733.000	55	3.776.600.000	52	3.034.563.000	55	2.025.849.000	57	2.746.815.000	59	3.030.901.000	59	3.030.901.000
		3.06.21	009	Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan hasil Musrenbang	Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	0	47	729.050.000	89	1.567.325.000	969	1.800.000.000	102	1.810.000.000	105	1.820.000.000	105	1.820.000.000
		3.06.20		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Jumlah Kelurahan yg melaksanakan program LHBS dan PHBS	kelurah a n	-	-	337.549.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
					Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%													

Tujuan/ Sasaran		Kode Program		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
								2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Targe	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3.06.20	001	Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan dan	Jumlah Kegiatan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK)	Kegiatan	4.028.575.000	373	420.000.000	375	420.000.000	375	790.037.000	378	801.937.000	378	813.956.000	378	813.956.000
		3.06.20	003	Fasilitasi kegiatan Penanggulangan kemiskinan	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan	kegiatan	410.000.000	19	243.187.000	24	758.254.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000

Sedangkan untuk tujuan OPD, sasaran strategis OPD, outcome dan output dapat dilihat pada Cascading Kecamatan Tembalang berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tembalang diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016-2021. Tujuan pembangunan daerah Kota Semarang yang termuat dalam perubahan RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang didukung oleh OPD Kecamatan Tembalang yaitu *Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat*, dengan indikator kinerja tujuan Tingkat Partisipasi Masyarakat. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator kinerja sasaran salah satunya yaitu persentase tingkat partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD ini, Kecamatan Tembalang melaksanakan urusan Kewilayahan dengan indikator kinerja daerah sebagai berikut, yaitu (1) Persentase kehadiran RT dalam musrenbang, (2) Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang, (3) Persentase kondisi sarpras kecamatan dan kelurahan yang ditangani melalui musrenbang.

Selain tujuan utama tersebut diatas, Kecamatan Tembalang juga mendukung tujuan pembangunan daerah yang lain, yaitu *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani*,

dengan indikator kinerja tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani dengan indikator kinerja sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kecamatan, Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dari tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam OPD Kecamatan Tembalang dalam Renstra yang disusun yaitu meningkatnya tata kelola birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani dan memberdayakan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya manajemen sumber daya aparatur dan kinerja pelayanan OPD dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, yang diturunkan dalam tujuan dan sasaran Renstra, OPD Kecamatan Tembalang melaksanakan 1 (satu) Urusan Kewilayahan. Dalam urusan kewilayahan terdapat 11 (sebelas) program yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Tembalang.

Program yang dilaksanakan Kecamatan Tembalang yaitu:

1. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja program (outcome):

- Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan
 - Persentase ketersediaan sarpras pelayanan masyarakat berbasis PATEN
 - Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar PATEN
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja program (outcome) Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPS
 3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator kinerja program (outcome) Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN
 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan indikator kinerja program (outcome) :
 - Jumlah asset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
 - Persentase Capaian hasil perolehan PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
 5. Program Pengelolaan Aset Pemerintah, dengan indikator kinerja program (outcome) jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

6. Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan indikator kinerja program (outcome) persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan.
7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja program (outcome), Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan indikator kinerja program (outcome), Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur.
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan indikator kinerja program (outcome), tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
10. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja program (outcome):
 - Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kecamatan dan Kelurahan yang tertangani.
 - Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikator kinerja program (outcome) :
 - Kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS
 - Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

12. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan, dengan indikator kinerja program (outcome), persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di lingkungan RT.
13. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan, dengan indikator kinerja program (outcome):
 - Persentase kondisi sarana prasarana lingkungan Kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang.
 - Persentase RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang.
 - Persentase kehadiran RT dalam Rembug Warga/Musrenbang.
14. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, dengan indikator kinerja program (outcome):
 - Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat – Kampung Tematik)
 - Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dari uraian program dan kegiatan diatas, OPD Kecamatan Tembalang mendukung tercapainya dua tujuan pembangunan Pemerintah Kota Semarang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, yaitu (1) *Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat*, dengan sasaran meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan (2) *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Melayani*, dengan sasaran

terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani dengan indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator kinerja Kecamatan Tembalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 7.1**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEWILAYAHAN KECAMATAN YANG MENDUKUNG KINERJA DAERAH**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Tingkat partisipasi masyarakat	%	62	69	70	71	72	73	75	75
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka indeks	76	78	79	81	83	85	87	87
3.	Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang	%	96,06	96,06	97,70	98,30	98,87	99,04	99,50	99,50
4.	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang	%	82,25	87,88	90,26	91,44	92,63	93,81	95,00	95,00
5.	Persentase kondisi sarana prasarana Kelurahan dan Kecamatan yang ditangani dalam Musrenbang	%	40,15	42,61	50	51	52	53	55	55

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra OPD Kecamatan Tembalang Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi OPD Kecamatan Tembalang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan perubahan Renstra ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisi tentang program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 dan merupakan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Mijen Kota Semarang. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan oleh OPD Kecamatan Mijen dalam Renstra ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian pelaksanaan indikator kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja dan sebagai dasar penyusunan program kerja OPD Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum Pemerintah Kota Semarang.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Namun demikian, dengan semangat untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yaitu “**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang HEBAT Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**” tersebut dapat tercapai melalui kinerja semua komponen organisasi Kecamatan Mijen sehingga dapat dan mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah kerja Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Semarang, 2018

CAMAT TEMBALANG
KECAMATAN
TEMBALANG
HEROE SOEKENDAR, S.Sos
Pembina
NIP.196801101988031005